

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Permasalahan keamanan manusia yang dialami oleh PMI yang bekerja sebagai *domestic worker* di Malaysia pada masa pemerintahan Joko Widodo masih terjadi dengan berbagai macam bentuk ancaman keamanan manusia. Adanya ancaman keamanan manusia yang dialami oleh pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai *domestic worker* di Malaysia ini mengakibatkan penting dalam menjamin upaya perlindungan baik dari pemerintah Indonesia maupun Malaysia.

Sejalan dengan kerangka teori yang telah digunakan penulis, yakni menggunakan konsep keamanan manusia yang dapat dideskripsikan dalam menjamin keamanan manusia bagi PMI informal di Malaysia. Konsep *Human Security* diartikan dari UNDP 1994 sebagai konsep keamanan manusia yang terdiri dari hak asasi manusia, kebutuhan manusia, pengembangan manusia serta adanya keterkaitannya antara perdamaian, pembangunan dan hak asasi manusia, dan sama-sama menganggap sipil, politik, ekonomi, hak sosial dan budaya. Dalam klasifikasi kemananan manusia sebagai multi-sektoral menurut United Nations Development Programme 1994 membagi 7 lingkup Human Security yaitu keamanan ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, individual , masyarakat dan keamanan politik. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan keamanan manusia dengan beberapa sub bab diantaranya keamanan ekonomi, keamanan kesehatan, keamanan politik dan keamanan individu.

Terdapat fenomena permasalahan keamanan manusia yang masih terjadi dialami oleh PMI yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia seperti tidak diberikan gaji, mengalami sakit maupun depresi, tidak memiliki dokumen yang lengkap, korban sindikat perdagangan manusia dan penganiayaan dari majikannya. Mereka yang banyak mengalami hal tersebut ialah PMI Informal yang bekerja secara ilegal (*unprosedural*) di Malaysia. Permasalahan tersebut

berdampak besar terhadap keamanan manusia yang berkaitan dengan *Freedom from fear* (fokus terkait isu kekerasan fisik, seksual serta bentuk penganiayaan) dan *Freedom from want* (fokus terkait isu dalam ekonomi, pekerjaan, makanan, kesehatan publik dan lingkungan).

Sehingga pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo telah melakukan upaya menjamin keamanan manusia terhadap PMI informal di Malaysia. Pemerintah Indonesia dengan Malaysia telah melakukan *Bilateral Meeting* pada tahun 2017-2018 tentang *domestic worker* dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Kementerian Sumberdaya Manusia Malaysia yang bertujuan untuk memberikan suatu perlindungan PMI informal di Malaysia. Bentuk hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia bertujuan menganagani permasalahan PMI informal terhadap ancaman *economic security*, *health security*, *political security*, dan *personal security*.

Bilateral meeting tersebut mewujudkan upaya perlindungan PMI informal terhadap 4 lingkup keamanan kemanusiaan dalam menangani permasalahan yang dialami PMI Informal di Malaysia. Lingkup pertama, bentuk upaya dari keamanan ekonomi misalnya PMI informal di Malaysia memperoleh gaji perbulan meliputi gaji kotor 1000 RM tetapi dipotong dari kebijakan Malaysia menjadi sekitar 950anRM. Lingkup kedua, bentuk upaya dari *health security*, PMI informal diberikan *double medical check up* baik dari pemerintah Malaysia maupun pemerintah Malaysia. Lingkup ketiga, terdapatnya *The Guideline of the Recruitment , Empolyment and Repatriation of Foreign Domestic Worker in Malaysia* dan Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia sebagai bentuk upaya dari *political security*.

Dan lingkup keempat, upaya dalam *personal security* bagi PMI informal di Malaysia mewujudkan adanya *job category* yang dimana sesuai dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia no 354 tahun 2015 tentang kategori jabatan yang diduduki bagi pengguna pekerja perseorangan (pekerja rumah tangga) yang bertujuan agar tidak lagi *multitasking* (semua urusan rumah dilakukan).

Pemerintah Indonesia pada masa pemerintah Joko Widodo tetap melakukan perlindungan PMI informal di Malaysia Meskipun, hingga saat ini belum ada keseriusan dari pihak pemerintah Malaysia terkait dalam MoU yang sudah habis masa berlakunya tahun 2016 tentang *domestic worker*, padahal pemerintah Indonesia sudah mendesak pemerintah Malaysia untuk memberikan kejelasan MoU tentang *domestic worker* dalam bilateral meeting tersebut. Tujuannya agar pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia dapat terjamin perlindungan hak dan kewajibannya.

4.2 Saran

Penelitian ini yang berjudul "Peran Pemerintahan Joko Widodo Menjamin Keamanan Manusia Terhadap Pekerja Migran Indonesia Sektor Informal di Malaysia" ini masih memiliki kekurangan yaitu metode pengumpulan data yang terbatas. Selain itu penelitian ini tidak membahas sejauh mana keefektifan dari upaya pada masa pemerintah Joko Widodo menjamin keamanan manusia bagi pekerja rumah tangga di Malaysia. Harapannya untuk peneliti selanjutnya dapat membahas keefektifan upaya pada masa pemerintah Joko Widodo menjamin keamanan manusia bagi pekerja rumah tangga di Malaysia.